**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

**2.1 *Good Governance***

Istilah *good governance* berasal dari induk bahasa Eropa, Latin, yaitu *Gubernare* yang diserap oleh bahasa inggris menjadi *govern*, yang berarti *steer* (menyetir, mengendalikan), *direct* (mengarahkan), atau *rule* (memerintah). Penggunaan utama istilah ini dalam bahasa inggris *to rule with authority,* atau memerintah dengan kewenangan.

Menurut Amaliah (2014: 14-15) Pemerintah daerah dituntut untuk menerapkan prinsip-prinsip *good governance*. Dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*, diharapkan dalam menggunakan dan melaksanakan kewenangan politik, ekonomi dan administratif dapat diselenggarakan dengan baik. Oleh sebab itu dalam prakteknya, konsep *good governance* harus ada dukungan komitmen dari semua pihak yaitu negara (*state*)/pemerintah (g*overnment*), swasta (*private*) dan masyarakat (*society*).

Menurut Mardiasmo (2009: 17) “*Governance* diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik”.

Menurut Santosa (2009: 130) “*Good governance* sebagai pengelolaan segala macam urusan publik secara efektif melalui pembuatan peraturan dan/atau kebijakan yang baik demi untuk mempromosikan nilai-nilai kemasyarakatan”.

*Good Governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) merupakan praktek penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. *Good governance* telah menjadi isu sentral, dimana dengan adanya pengaruh era globalisasi dan meningkatnya pengetahuan masyarakat, tuntutan akan penyelenggaraan pemerintahan yang baik gencar dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa *Good Governance* merupakan tata kelola pemerintah yang baik yaitu, berupa sistem yang mengatur dan mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah suatu kesepakatan menyangkut peraturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat madani, dan swasta.

**2.1.1 Prinsip-Prinsip *Good Governance***

Adapun prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan untuk menerapkan Good Governance di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut Peraturan Menteri BUMN No.PER/01/MBU/2012 yaitu:

1. Transparansi

Transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materil dan relevan mengenai instansi dan mencegah upaya penyembunyian informasi yang relevan.

1. Kemandirian

Kemandirian, yaitu suatu keadaan dimana instansi dikelola secara professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi-fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organisasi sehingga pengelolaan instansi terlaksana dengan baik.

1. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan instansi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Kewajaran

Kewajaran, yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak yang timbul berdasarkan perjanjian dan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara *Organization for Economic Cooperation and Development* dalam Amaliah (2014:15-16) menyebutkan 4 hal pokok yang menjadi prinsip dasar *Good Government Governance*, diantaranya adalah:

1. Keadilan (*fairness*)

Melindungi segenap kepentingan masyarakat dan stakeholder lainnya dari rekayasa-rekayasa dan transaksi-transaksi yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

1. Tranparansi (*transparency*)

Meningkatkan keterbukaan (*disclosure*) dari kinerja pemerintah daerah secara teratur dan tepat waktu (*timely basis*) serta benar (*accurate*).

1. Dapat dikontrol (*Accountability*)

Menciptakan system pengawasan yang efektif didasarkan atas distribusi dan keseimbangan kekuasaan (*distribution and balance of power*).

1. Tanggung jawab (*responsibility*)

Pemerintah memiliki tanggungjawab untuk mematuhi hukumdan ketentuan peraturan yang berlaku termasuk tanggap terhadap kepentingan masyarakat.

Berdasarkan berbagai pendapat mengenai prinsip-prinsip *good governance* di atas, ternyata jumlah komponen prinsip-prinsip *good governance* sangat bervariasi. Namun demikian, prinsip-prinsip tersebut tidaklah berdiri sendiri, tapi saling berkaitan dalam satu kesatuan hubungan yang erat, sehingga masing-masing prinsip menjadi instrumen yang diperlukan untuk mencapai prinsip yang lainnya.

**2.1.2 Tujuan *Good Governance***

Dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, tujuan dari *Good Governance* adalah :

1. Birokrasi yang bersih, adalah birokrasi yang sistem dan aparaturnya bekerja atas dasar aturan dan koridor nilai- nilai yang dapat mencegah timbulnya berbagai tindak penyimpangan dan perbuatan tercela seperti korupsi, kolusi dan nepotisme.

2. Birokrasi yang efisien, efektif dan produktif, adalah birokrasi yang mampu memberikan dampak kerja positif (manfaat) kepada masyarakat dan mampu menjalankan tugas dengan tepat, cermat, berdayaguna dan tepat guna (hemat waktu, tenaga, dan biaya).

3. Birokrasi yang transparan, adalah birokrasi yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar dan tidak diskriminatif dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara.

4. Birokrasi yang melayani masyarakat, adalah birokrasi yang tidak minta dilayani masyarakat, tetapi birokrasi yang memberikan pelayanan prima kepada publik.

5. Birokrasi yang akuntabel, adalah birokrasi yang bertanggungjawab atas setiap proses dan kinerja atau hasil akhir dari program maupun kegiatan, sehubungan dengan pengelolaan dan pengendaliaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan untuk mencapai tujuan.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari *Good Governance* yaitu untuk menciptakan sistem pemerintahan yang baik sehingga memberikan dampak yang baik bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang status sosial.

**2.1.3 Manfaat Penerapan *Good Governance***

Menurut Meyi Kantu (2015 :5) manfaat dari penerapan *Good Governance* yaitu :

1. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas

Dengan menerapkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintah berdasarkan *Good Government Governance* pemerintah akan dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Hal ini dikarenakan seluruh personil dipemerintah pada setiap level dan biro akan berusaha menyumbangkan segenap kemampuannya untuk kepentingan pemerintahan dan bukan atas dasar mencari keuntungan secara pribadi, dan atau kelompok. Dengan demikian tidak terjadi pemborosan diakibatkan penggunaan sumber daya yang dipergunakan untuk kepentingan pihak tertentu yang tidak sejalan dengan kepentingan pemerintahan daerah. Setiap personil pemerintahan yang menyumbangkan seluruh kemampuannya didasari kepercayaan bahwa kepala daerah juga melakukan hal sama bagi mereka, yaitu bersikap adil dalam pemberian penghargaan bagi seluruh pihak yang berkepentingan dengan pemerintahan

1. Meningkatkan kepercayaan publik

Dengan menerapkan prinsip-prinsip *Good Government Governance* akan dapat meningkatkan kepercayaan publik. Publik dalam hal ini dapat berupa mitra pemerintah, baik sebagai investor, pemasok, pelanggan, kreditor, maupun masyarakat umum. Bagi investor dan kreditor penerapan *Good Government Governance* bagi mitranya adalah suatu hal yang mutlak untuk dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pelepasan dana investasi maupun kreditnya. Dengan menerapkan prinsip *Good Government Governance,* maka baik investor maupun kreditor akan merasa lebih aman karena pemerintah dijalankan dengan prinsip yang mengutamakan kepntingan semua pihak, dan bukan pihak tertentu saja. Sejalan dengan iklim globalisasi yang kita rasakan saat ini, dimana daerah wajib mampu berintegrasi dan bersaing dalam skala internasional tidak dapat dihindari lagi, yang berarti bahwa aspek *Good Government Governance* menjadi salah satu prasayarat mutlak layak operasi dan mutlak layak investasi bagi kalangan investor baik domestic maupun manca negara.

1. Menjaga kelangsungan pemerintah daerah

Dengan menjalankan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dapat dikontrol, dan bertanggungjawab, maka kelangsungan pemerintahan dapat dijamin. Dengan prinsip keadilan tidak ada pihak yang istimewa dan tidak diistimewakan, karena apabila pemerintahan dijalankan dengan tidak adil maka akan menimbulkan pertentangan antara pihak yang berkepentingan dengan pemerintahan sehingga dapat mengancam kewibawaan pemrintahan daerah. Prinsip transparansi akan memudahkan semua pihak yang berkepntingan terhadap pemerintah.

1. Dapat mengukur target pemerintah daerah

Dengan berpedoman pada prinsip keadilan, transparansi, akuntabilitas dan responsibilitas, maka target kinerja pemerintan dapat diukur dan dibandingkan bila pemerintahan tidak menerapkan prinsip yang didasarkan pada *Good Government Governance.*

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa manfaat penerapan *Good Governance* yaitu untuk menciptakan sistem pemerintahan yang bersih bebas KKN, efektif, efisien, transparan, professional dan akuntabel serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik.

**2.2 Komitmen Organisasi**

Keberhasilan pengelolaan pemerintah daerah sangatlah ditentukan oleh keberhasilan dalam mengelola SDM. Tinggi rendahnya komitmen karyawan terhadap organisasi tempat mereka bekerja, sangatlah menentukan kinerja yang akan dicapai organisasi.

Dalam dunia kerja komitmen karyawan memiliki pengaruh yang sangat penting, bahkan ada beberapa organisasi bahkan memasukkan unsur komitmen sebagai salah satu syarat untuk memegang jabatan/posisi yang ditawarkan dalam iklan lowongan kerja. Pegawai yang memiliki komitmen organisasi tinggi akan melakukan usaha yang maksimal dan memiliki keinginan yang kuat untuk mencapai tujuan organisasi, Sebaliknya pegawai yang memiliki komitmen organisasi rendah akan melakukan usaha yang tidak maksimal dengan keadaan terpaksa.

Menurut Kreitner dan Kinicki (2014:173) bahwa:

Komitmen organisasi sebagai tingkatan dimana seseorang mengenali sebuah organisasi dan terikat pada tujuan-tujuannya. Ini adalah sikap kerja yang penting untuk dimiliki oleh seorang pegawai karena komitmen organisasi menunjukkan kesediaan pegawai untuk bekerja lebih keras dalam mencapai tujuan organisasi.

Sedangkan menurut Newstrom (2011: 223) bahwa:

Komitmen organisasi merupakan tingkatan dimana pekerja mengidentifikasi dengan organisasi dan ingin melanjutkan secara aktif berpartisipasi di dalamnya Komitmen Organisasi merupakan ukuran tentang keinginan pekerja untuk tetap dalam organisasi di masa depan. Komitmen berhubungan dengan kuat dan terikat dengan organisasi di tingkat emosional.

Gibson, Ivancevich, Donnelly, dan Konopaske (2012: 182) memberikan pengertian “komitmen organisasi sebagai perasaan identifikasi, loyalitas, dan pelibatan dinyatakan oleh pekerja terhadap organisasi atau unit dalam organisasi”.

Berdasarkan berbagai definisi yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan Komitmen Organisasi adalah suatu perasaan ikatan antara individu dengan organisasi tempat individu bekerja, di mana individu tersebut memiliki rasa memiliki organisasi, yang dibuktikan dengan keyakinan yang kuat serta melalukan yang terbaik untuk dapat mencapai tujuan organisasi. Komitmen Organisasi membuat individu memiliki kemauan yang kuat untuk melakukan sesuatu dengan kemampuan dan ketrampilan yang dimiliki dan lebih mementingkan kepentingan organisasi, agar organisasi dapat mencapai keberhasilan.

**2.2.1 Karakteristik Komitmen Organisasi**

Komitmen organisasi menggambarkan relative kuatnya identifikasi individu dan keterlibatan didalam organisasi. Menurut Sunyoto dan Burhanudin (2011:26) Komitmen Organisasi terdiri dari tiga komponen utama,yaitu:

1. Kepercayaan seseorang yang kuat dan menerima tujuan organisasi
2. Kesediaan seseorang mengupayakan sekuat tenaga untuk menjadi bagian dari organisasi
3. Keinginan seseorang untuk memelihara keanggotaannya.

Berdasarkan pejelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa karakteristik komitmen organisasi merupakan adanya keyakinan yang kuat dan penerimaan atas nilai dan tujuan organisasi, kesedian untuk mengusahakan yang terbaik bagi organisasi, dan adanya keinginan yang pasti untuk bertahan dalam organisasi.

**2.2.2 Indikator Komitmen Organisasi**

Robbins (2012:99) mengemukakan tiga indikator yang bisa digunakan untuk mengukur Komitmen Organisasi, yaitu :

1. Komponen afektif *(affective commitment)*

merupakan keinginan yang kuat dalam diri individu untuk tetap berada dalam organisasi. Komitmen afektif terjadi ketika pegawai ingin menjadi bagian sebagai anggota dalam organisasi dikarenakan adanya ikatan emosional atau psikologis individu terhadap pegawai.

1. Komponen normatif *(normative commitment)*

merupakan kepercayaan yang kuat pegawai terhadap organisasi, termasuk penerimaan nilai, sasaran, dan tujuan organisasi. Komitmen normatif berasal dari nilai-nilai dalam diri pegawai. Pegawai bertahan menjadi anggota suatu organisasi karena memiliki kesadaran bahwa dia memang berkewajiban untuk melakukannya.

1. Komponen berkelanjutan *(continuance commitment)*

merupakan kemauan untuk berusaha demi keberhasilan organisasi. Komitmen berkelanjutan ini muncul apabila pegawai tetap bertahan dalam organisasi karena alasan tertentu, biasanya hal-hal yang bersifat menguntungkan. Pegawai tetap tinggal di dalam organisasi karena dia membutuhkan organisasi tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga komponen di dalam komitmen organisasi yaitu komponen afektif, komponen normatif dan komponen berkelanjutan.

**2.3 Kualitas Laporan Keuangan Daerah**

Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi keuangan suatu instansi mengenai posisi keuangan apakah keuangan instansi dalam keadaan baik atau sebaliknya. Informasi yang berada di dalam laporan keuangan, dapat membantu pihak-pihak yang berkepentingan sebagai pertimbangan didalam pemgambilan keputusan.

Peraturan Pemeritah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) mengemukakan “ Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan”

Menurut Permendagri No.13 Tahun 2016 bahwa:

Laporan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2017) bahwa:

Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba, laporan rugi, laporan perubahan posisi keuangan ( yang disajikan dalam berbagai cara misalnya laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan, dan laporan lain serta penjelasan dari bagian integral laporan keuangan.

Berdasarkan berbagai pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses pencatatan keuangan, yang merupakan hasil pencerminan prestasi yang dicapai pada suatu periode tertentu dibuat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya oleh suatu entitas pelaporan.

**2.3.1** **Tujuan Laporan Keuangan Daerah**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Sedangkan menurut Mardiasmo (2009:161) secara umum tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik adalah:

1. Kepatuhan dan Pengelolaan *(compliance and stewardship)*

Laporan Keuangan digunakan untuk memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lain yang telah ditetapkan

1. Akuntabilitas dan Pelaporan Retrospektif *(accountability and retrospective reporting)*

Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Laporan keuangan digunakan untuk memonitor kinerja dan mengevaluasi manajemen. Laporan keuangan juga memungkinkan pihak luar untuk memperoleh informasi biaya atas barang dan jasa yang diterima, serta memungkinkan untuk mereka menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya organisasi

1. Perencanaan dan Informasi Otorisasi *(planning and authorization information)*

Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan dasar perencanaan kebijakan dan aktivitas dimasa yang akan datang. Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan informasi penduduk mengenai otorisasi penggunaan dana.

1. Kelangsungan organisasi *(viability)*

Laporan keuangan berfungsi untuk membantu pembaca dalam menentukan apakah suatu organisasi atau unit kerja dapat meneruskan menyediakan barang dan jasa (pelayanan) di masa yang akan datang

1. Hubungan masyarakat *(public relation)*

Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada organisasi untuk mengemukakan pernyataan atas prestasi yang telah dicapai kepada pemakai yang dipengaruhi karyawan dan masyarakat. Laporan Keuangan berfungsi sebagai alat komunikasi dengan publik dan pihak-pihak lain yang berkepentingan

1. Sumber fakta dan gambaran *(source of facts and figures)*

Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi kepada berbagai kelompok kepentingan yang ingin mengetahui organisasi secara lebih dalam

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan laporan keuangan daerah adalah untuk memberikan informasi keuangan yang digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi serta sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan keuangan daerah.

**2.3.2** **Komponen Laporan Keuangan Daerah**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dlaam satu periode pelaporan.

Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
2. Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
3. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil
4. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran emerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.
5. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelapporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

1. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari asset, kewajiban, dan ekuitas.

Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
2. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
3. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban pemerintah.
4. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
2. Beban adalah kewajiban pemeriintah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih.
3. Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
4. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadiaan atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada diluar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.
5. Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. Masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penerimaan kas adalah semua aliran kkas yang masuk ke Bendahara Umum Negara/Daerah
2. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Negara/Daerah.
3. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

1. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Lporan Keuangan meliputi pejelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diuangkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa komponen laporan keuangan daerah terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan atas Laporan Keuangan.

**2.3.3 Kualitas Laporan Keuangan Daerah**

Dalam menyusun laporan keuangan, pemerintah harus membuat laporan keuangan yang menyajikan informasi keuangan yang berguna bagi pemakai laporan keuangan. Untuk mencapai laporan keuangan yang berguna harus mempunyai kualitas yang baik.

Menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) ada empat karakteristik yang merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki dan juga dapat agar laporan keuangan yang dihasilkan harus beracuan dengan PP No. 71 Tahun 2010 yang menghatuskan laporan keuangan berbasis akrual. Keempat karakteristik tersebut adalah sebagai berikut:

1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu dan masa kini, dan memprediksi masa depan. Informasi yang relevan memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Memiliki manfaat umpan balik *(feedback value)*

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.

1. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

1. Tepat waktu

Informasi disajika tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan

1. Lengkap

Informasi akuntansi keuangan disajikan selengkap mungkin yaitu, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan

1. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi yang andal memiliki karakteristik:

1. Penyajian jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan

1. Dapat diverifikasi

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukan simpulan yang tidak berbeda jauh

1. Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu

1. Dapat dibandingkan

Informasi yang ada didalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dilakukan dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke-tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diuangkapkan pada periode terjadinya perubahan.

1. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh penggunaan dan dinyatakan dlaam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batasan pemahaman para pengguna. Untuk itu pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan guna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Berdasarkan pejelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa suatu laporan keuangan dapat dikatakan berkualitas apabila di dalam laporan keuangan tersebut mengandung empat karakteristik yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami

**2.4 Penelitian Terdahulu**

Judul yang diangkat tentu tidak lepas dari penelitian terdahulu sebagai landasan dan referensi dalam menyusun sebuah kerangka pikir ataupun arah dari penelitian ini. Berikut adalah penelitian terdahulu :

**Tabel 2.1**

**Kajian Penelitian Terdahulu**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama****( Tahun )** | **Judul Penelitian** | **Variabel Penelitian** | **Hasil Penelitian** |
| 1**No** | Desmaria Puji Kesuma, Choirul Anwar, Darmansyah (2017)**Nama****( Tahun )** | Pengaruh Good Governance, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sisem Pengendalian Internal Pemerintah dan Kompetensi Aparatur Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pada Satuan Kerja Kementrian Pariwisata**Judul Penelitian** | X1 = Good GovernanceX2 = Penerapan Standar Akuntansi PemerintahX3 = Sisem Pengendalian Internal PemerintahX4 = Kompetensi Aparatur PemerintahY = Kualitas Laporan Keuangan**Variabel Penelitian** | Secara parsial Good Governance berpengaruh tidak signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.Standar Akuntansi Pemerintah secara parsial mempunyai pengaruh tidak signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Sistem Pengendalian Internal secara parsial memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.Kompetensi Aparatur Pemerintah secara parsialberpengaruh tidak signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Variabel Good Governance, Penerapan **Hasil Penelitian** |
|  |  |  |  | Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal, Kompeetensi Aparatur secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan |
| 2 | Liziana Widari, Sutrisno (2017) | Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Komitmen Organisasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah | X1 = Sistem Pengendalian InternalX2 = Komitmen OrganisasiY = Kualitas Laporan Keuangan | Sistem Pengendalian memiliki pengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kota Sukabumi. Komitmen Organisasi memiliki pengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kota Sukabumi. Sistem Pengendalian Internal dan Komitmen Organisasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan |
| 3**No** | Mia Oktarina, Kharis Raharjo, Rita Andini (2014)**Nama****( Tahun )** | Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah dan Good Governance terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Kota Semarang**Judul Penelitian** | X1 = Standar Akuntansi PemerintahanX2 = Kualitas Aparatur PemerintahX3 = Good GovernanceY = Kualitas Laporan Keuangan**Variabel Penelitian** | Ada pengaruh antara penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD kota Semarang.Ada pengaruh antara Kualitas Aparatur Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD kota SemarangAda pengaruh antara Good Governance terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD kota Semarang Variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Aparatur Pemerintahan dan Good Governance secara **Hasil Penelitian** |
|  |  |  |  | bersama-sama berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan |
| 4 | Azlim, Darwanis, Usman Abu Bakar (2012) | Pengaruh Penerapan Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Informasi Keuangan SKPD di Kota Banda Aceh | X1 = Good GovernanceX2 = Standar Akuntansi PemerintahanY = Kualitas Informasi Keuangan | Penerapan Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh secara simultan terhadap kualitas informasi keuangan SKPPD di Kota Banda AcehPenerapan Good Governance berpengaruh terhadap kualitas informasi keuangan SKPD di Kota Banda AcehPenerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap Kualitas Informasi Keuangan SKPD di Kota Banda Aceh |
| 5 | Arvian Triantoro, Nugraha (2014) | Pengaruh Kompetensi Pegawai dan Komitmen Organisasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Pangkat Daerah (SKPD) di Kota Bandung | X1 = Kompetensi PegawaiX2 = Komitmen OrganisasiY = Kualitas Laporan Keuangan  | Hasil penelitian menjelaskan ada pengaruh positif kompentensi pegawai terhadap kualitas laporan keuangan, untuk variabel komitmen organisasi juga berpegaruh terhadap kualitas laporan keuangan SKPD di Kota Bandung |

*Sumber : Data yang diolah, 2018*

**2.5 Kerangka Penelitian**

Menurut Mardiasmo (2009: 17) *Governance* diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik. *Good governance* merupakan bentuk praktek penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. *Good governance* telah menjadi isu sentral, dimana dengan adanya era globalisasi tuntutan akan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah suatu keharusan seiring dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah suatu kesepakatan menyangkut peraturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat madani dan swasta.

Adapun prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan untuk menerapkan Good Governance di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut Menteri BUMN No.PER/01/MBU/2012 yaitu:

1. Transparansi

Transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materil dan relevan mengenai instansi dan mencegah upaya penyembunyian informasi yang relevan.

1. Kemandirian

Kemandirian, yaitu suatu keadaan dimana instansi dikelola secara professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi-fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organisasi sehingga pengelolaan instansi terlaksana dengan baik.

1. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan instansi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Kewajaran

Kewajaran, yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak yang timbul berdasarkan perjanjian dan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian Kantu (2015 :11) membuktikan bahwa penerapan *good governance* berpengaruh signifikan dan positif terhadap kualitas laporan keuangan. Apabila instansi menerapkan prinsip-prinsip *good governance* maka kualitas laporan keuangan instansi tersebut akan terus meningkat.

Hal tersebut juga dibuktikan dalam penelitian Rosdiani (2011:102) bahwa penerapan *good corporate governance* berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Serta dalam penelitian Novatiani dan Jeanny Fatimmah (2012: 16) yang membuktikan bahwa penerapan *good governance* berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan.

Sedangkan yang dimaksud dengan Komitmen Organisasi yaitu tujuan dimana seseorang mengenali sebuah organisasi dan terikat pada tujuan-tujuannya (Kreitner dan Kinicki, 2014 :173). Komitmen Organisasi merupakan suatu ikatan antara pegawai dengan instansi, dimana pegawai tersebut mempunyai rasa memiliki instansi tempat dia bekerja, yang dibuktikan dengan keyakinan yang kuat serta dukugan terhadap nilai, sasaran, dan tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi. Komitmen Organisasi membuat pegawai memiliki tekad yang kuat untuk berbuat sesuatu dengan mengerahkan kemampuan dan ketrampilan yang dimiliki, lebih mengutamakan kepentingan instansi tempat dia bekerja, agar instansi dapat mencapai keberhasilannya. Allen & Meyer (1984) dalam Robbins (2012:99) menyebutkan tiga indikator di dalam Komitmen Organisasi yaitu :

1. Komponen Afektif

merupakan keinginan yang kuat dalam diri individu untuk tetap berada dalam organisasi. Komitmen afektif terjadi ketika pegawai ingin menjadi bagian sebagai anggota dalam organisasi dikarenakan adanya ikatan emosional atau psikologis individu terhadap pegawai.

1. Komponen Normatif

merupakan kepercayaan yang kuat pegawai terhadap organisasi, termasuk penerimaan nilai, sasaran, dan tujuan organisasi. Komitmen normatif berasal dari nilai-nilai dalam diri pegawai. Pegawai bertahan menjadi anggota suatu organisasi karena memiliki kesadaran bahwa dia memang berkewajiban untuk melakukannya.

1. Komponen Berkelanjutan

merupakan kemauan untuk berusaha demi keberhasilan organisasi. Komitmen berkelanjutan ini muncul apabila pegawai tetap bertahan dalam organisasi karena alasan tertentu, biasanya hal-hal yang bersifat menguntungkan. Pegawai tetap tinggal di dalam organisasi karena dia membutuhkan organisasi tersebut.

Komitmen Organisasi yang kuat pada instansi tempat bekerja akan menimbulkan dampak positif bagi kualitas laporan keuangan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Liziana Widari dan Sutrisno (2017:7) ketika seorang pegawai mempunyai komitmen yang tinggi terhadap apa yang menjadi pencapaian tujuan organisasinya maka akan semakin *output* nya, begitupun sebaliknya, terkait dengan laporan keuangan yang dihasilkan oleh satuan kerja perangkat daerah, dengan komitmen yang tinggi dari seluruh komponen yang terlibat dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah maka akan menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik.

Hal tersebut juga dibuktikan oleh penelitian sebelumnya yaitu penelitian Herman (2015:15) dengan tesis berjudul Pengaruh Komitmen Organisasi dan Audit Internal terhadap Kulitas Informasi Laporan Keuangan yang menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah menyebutkan bahwa laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

Adapun karakteristik laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang di kehendaki:

1. Relevan
2. Andal
3. Dapat dibandingkan
4. Dapat dipahami

Bentuk laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran adalah dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Laporan keuangan pemerintah kemudian di sampaikan DPR/DPRD dan masyarakat umum setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemerintah daerah berkewajiban mempublikasikan informasi berdasarkan laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan. Dengan demikian, informasi yang dipublikasikan tersebut dapat dimanfaatkan oleh para pemakai. Informasi akan bermanfaat apabila informasi tersebut dapat dipahami, dipercaya dan digunakan oleh pemakai informasi tersebut (Andriani, 2010 :2). Dapat diartikan bahwa *good governance* dan komitmen organisasi dapat mendorong terciptanya kualitas laporan keuangan pemerintah yang baik (Rima, 2015:33)

Berdasarkan uraian diatas maka akan tampak pada gambar paradigma penelitian dibawah ini:

*Good Governance* (X1)

Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Komitmen Organisasi (X2)

**Gambar 2.1**

**Paradigma Penelitian**

**2.6 Hipotesis**

Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| $$H\_{1}$$ | : | Good Governance berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan |
| $$H\_{2}$$ | : | Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan |
| $$H\_{3}$$ | : | Good Governance, Komitmen Organisasi berpengaruh secara simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan |